

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mahasiswa memiliki peran yang strategis dalam keberlangsungan suatu negara. Mahasiswa sebagai kasta sosial intelektual berperan besar dalam perkembangan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai *agent of change* dimana diyakini mampu membawa suatu proses perubahan sebuah keputusan ke arah yang lebih baik dalam suatu negara dalam setiap aspek kehidupan. Sehingga sebagai aktivis intelektual mahasiswa berpengaruh dalam perpolitikan suatu negara. Mahasiswa harus mempelajari dunia perpolitikan sehingga mampu membawa pengaruh besar berdasarkan kualitas dan kemampuannya masing-masing untuk masa depan negara. Wadah awal mahasiswa dapat diwujudkan dalam miniatur negara dan pemerintahan. Kampus bukan hanya wadah bagi mahasiswa menjalankan kesehariannya dalam mengikuti proses belajar, tetapi mahasiswa juga dapat mengembangkan *skill* nya sebagai masyarakat sipil yang mempunyai hak-hak sipil dalam kehidupan sosial dan politiknya. Oleh karena itu, dinamika mahasiswa di kampus bukan hanya menerima ilmu pengetahuan akan tetapi juga mampu berperan dalam segala aktivitas-aktivitas sosial politik.

Di wilayah kampus dapat kita lihat kehidupan politik berlangsung dalam lingkup yang lebih kecil. Kampus sering disebut sebagai miniatur dari sebuah negara. Selayaknya sebuah negara, kampus memiliki struktur formal dalam menjalankan tugasnya dalam pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan dan

wakil-wakil dari rakyat yang dilakukan dalam suatu pemilihan, seperti presiden, menteri gubernur, dewan perwakilan bahkan bupati. Beberapa kesamaan antara kampus dan negara, seperti tatanan pemerintahan, mempunyai pimpinan mulai dari ruang lingkup fakultas (daerah) sampai tingkat universitas (pusat/nasional) (Muhammad 2023). Bahkan di wilayah kampus terdapat wadah bagi mahasiswa selayaknya partai-partai politik yang dikenal dengan organisasi mahasiswa eksternal kampus. Hampir di dalamnya tidak ada perbedaan antara kehidupan politik di kampus dan negara, yang mana masing-masing memiliki kepentingannya dalam hal perebutan kekuasaan atau lainnya. Berdasarkan dari pendekatan kekuasaan dan pendekatan konflik yang dicetuskan oleh Ramlan Surbakti dimana politik sebagai cara yang digunakan dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dan kepentingan (Chosilin & Nasiawan, 2016). Biasanya kehidupan politik kampus akan diperankan oleh aktivitas-aktivitas non akademis, melalui Unit Kegiatan Mahasiswa, Organisasi-Organisasi Intra maupun Ekstra kampus. Di kampus sebagai tempat pemikiran dari berbagai ideologi-ideologi bertarung sehingga memunculkan gerakan politik mahasiswa dengan membentuk kelompok-kelompok berdasarkan ideologi yang dimilikinya. Dengan konsep tersebut memunculkan “Politik Kampus” sebagai bentuk kecil dari politik dalam suatu negara. Panasnya politik kampus tidak kalah panas dengan politik yang ada di negara, bahkan mungkin lebih marak dikarenakan masih belum adanya kestabilan dalam diri masing-masing aktor politik kampus. Sehingga pelaku-pelaku tersebut masih memiliki kecenderungan digoyahkan pendiriannya dengan berbagai alasan.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan organisasi kemahasiswaan

yang didirikan oleh Lafran Pane bersama dengan 14 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam di Yogyakarta pada 5 Februari 1947. Awal mula berdirinya organisasi berlambang warna hijau, hitam dan putih ini dimana suasana politik di Yogyakarta mengalami polarisasi politik antara Partai Sosialis dan partai Masyumi. Yang kemudian polarisasi ini membawa sebagian besar mahasiswa yang tergabung dalam Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta cenderung berpihak kepada Partai Sosialis. Sehingga demi menolak polarisasi politik yang terjadi mahasiswa-mahasiswa yang menolak mendirikan organisasi-organisasi baru. Selain itu, tujuan Lafran Pane dan ke-14 temannya mendirikan HMI adalah untuk membangkitkan kembali mahasiswa yang menyalurkan aspirasinya dengan nilai-nilai keagamaan di dalamnya.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memiliki kekuatan sendiri dalam mempengaruhi jalannya pemerintahan. Dalam sebuah sistem politik peranan kekuatan politik terutama mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan/kebijakan publik yang mengikat masyarakat dalam bentuk dukungan, penenangan, mengubah isi keputusan ataupun mendesak aktor politik yang berwenang membuat keputusan (Halking 2018). Sebagai organisasi mahasiswa resmi dan diakui eksistensinya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memiliki hak yang sama dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kampus tak terkecuali dalam Pemilihan Raya (PEMIRA) yaitu pemilihan SEMA (Senat Mahasiswa), SEMAF (Senat Mahasiswa Fakultas), BPMF, (Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas) dan HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) dengan organisasi-organisasi lainnya di Universitas Negeri Medan.

Kekuatan politik dapat dilihat saat proses politik secara input yaitu dalam proses pembuatan kebijakan publik. Keterlibatan kekuatan politik dalam pembuatan kebijakan publik memungkinkan adanya *check and balance* selama proses pembuatan kebijakan publik berlangsung. Kekuatan politik di luar parlemen juga mempengaruhi proses pembuatan kebijakan bukan hanya parlemen saja. Tujuan dari keterlibatan lembaga luar parlemen dalam menggunakan kekuatan politiknya bukan hanya untuk kepentingan kelompok sendiri tetapi juga selayaknya untuk kepentingan masyarakat seluruhnya. Selain dari itu, kekuatan politik dapat dimaknai dalam menggunakan sumber-sumber kekuasaannya yang mampu mempengaruhi untuk terlibat secara aktif dalam dunia politik seperti dengan mencalonkan diri dalam Pemilihan Raya.

Proses politik yang berlangsung di wilayah kampus juga tidak jauh berbeda dengan proses politik di suatu negara. Proses politik terjadi karena adanya input yang diterima dan ditampung oleh pemegang kekuasaan yang kemudian akan menjadi bahan diskusi untuk dicari penyelesaiannya, sehingga selanjutnya melahirkan sebuah kebijakan atau keputusan. Di kampus pada proses input akan dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa maupun organisasi-organisasi ekstra kampus yang kemudian akan diwakilkan untuk disampaikan kepada birokrasi kampus.

Negara dengan politik yang demokratis, berarti mengutamakan kepentingan dari rakyat. Sudah seharusnya pemegang kekuasaan mendengarkan dan menerima masukan dari rakyat, karena kemudian output yang dikeluarkan adalah untuk kepentingan khalayak banyak. Birokrasi kampus seharusnya juga melakukan hal serupa, mementingkan keinginan dan kepentingan dan suara dari masyarakat

kampus termasuk di dalamnya adalah mahasiswa. Berdasarkan dari data yang ditemukan di lapangan, bahwa proses input dalam sistem politik di kampus masih sangat kecil untuk kemudian menjadi bahan diskusi oleh birokrasi kampus, baik dalam tuntutan maupun dukungan. Kampus masih terbilang tertutup dalam menangkap suatu keinginan dan suara dari khalayak kampus.

Oleh karena itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organisasi dengan usia yang cukup tua, memiliki eksistensi yang tinggi dihadapan masyarakat-masyarakat kampus. Selain itu, kader-kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang sudah menjadi alumni, menjadi salah satu organisasi yang menyumbangkan aktivis nya untuk berkecimpung ke dalam dunia perpolitikan secara langsung, baik dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi. Berdasarkan dari data yang didapat dari lapangan, kader-kader Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) di Universitas Negeri Medan sering menduduki kursi jabatan baik di SENAT, SEMAF, BPFM, ataupun HMJ di wilayah fakultas masing-masing. Dalam beberapa tahun terakhir kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) selama beberapa periode berhasil menduduki jabatan dalam SENAT Mahasiswa bahkan menjadi pernah Presiden Mahasiswa di Universitas Negeri Medan. Pada kepemimpinan senat mahasiswa tahun 2022, kader Himpunan Mahasiswa Islam berhasil menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan dari hal menarik tersebut memunculkan suatu pertanyaan terkait tentang Bagaimana Kekuatan Politik Organisasi Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dalam Proses Politik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul **Kekuatan Politik Organisasi Kemahasiswaan**

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Dalam Proses Politik (Studi Di Universitas Negeri Medan) sebagai fokus penelitian.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari judul yang diangkat, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1.1.1. Kekuasaan politik yang dimiliki oleh Himpunan Mahasiswa Islam

1.1.2. Minimnya pengaruh mahasiswa dalam mempengaruhi sebuah keputusan kampus.

1.1.3. Sumber kekuasaan yang tidak digunakan secara maksimal dalam proses politik

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas, maka peneliti fokus penelitiannya, yaitu Kekuatan Politik Organisasi Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Dalam Proses Politik.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Kekuatan Politik Organisasi Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Dalam Proses Politik Studi di Universitas Negeri Medan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang diterangkan penulis, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Kekuatan Politik Organisasi

Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Dalam Proses Politik Studi di Universitas Negeri Medan.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi ataupun dasar kajian bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan atau melakukan penelitian dengan masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengetahuan wawasan pembaca dan pihak-pihak yang terkait Kekuatan Politik Organisasi Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Dalam Proses Politik Studi di Universitas Negeri Medan

THE
Character Building
UNIVERSITY